

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Kebijakan dan orientasi pembangunan nasional bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki pembangunan jangka panjang kedua (PJP II), mengarah kepada proses industrialisasi. Melalui proses industrialisasi, dipandang mampu mempercepat terwujudnya kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (GBHN, 1993/1998:24).

Pandangan itu dipengaruhi oleh pengalaman negara-negara maju, di mana industri telah menjadi salah satu simbol keperkasaan dan kemajuan suatu bangsa. Negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, Eropah dan Jepang disegani karena berhasil meningkatkan taraf hidupnya lewat investasi di bidang industri (Albert Wijaya, 1982:10).

Proses industrialisasi dikenal manusia sejak abad 18 di Inggris dalam bidang mekanik. Mekanisasi tersebut berdampak terhadap lahirnya berbagai jenis produksi dalam menjawab berbagai kebutuhan manusia. Memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi keperluannya, menaikkan devisa negara, membuka lapangan kerja, meningkatnya income

perkapita, dan meningkatnya kesejahteraan manusia, dari konsep ideal-statis kepada aktualisasi dinamis dan merata. Karenanya, menurut Soedjatmoko (1983:101), industrialisasi telah menjadi bagian dari sistem sosial.

Belling dan Totten (1980:5) memandang konsep industrialisasi sama dengan modernisasi. Modernisasi itu menunjukkan suatu tipe perubahan sosial sebagai akibat dari revolusi industri dan revolusi politik. Oleh karena itu, negara-negara dunia ketiga yang rata-rata penduduknya 40% sampai dengan 60% terjerat dalam lembah kemiskinan (Hans Dieter-Evers, 1979:10) bergegas membangun negaranya melalui industrialisasi, atau berupaya mengembangkan tatanan masyarakatnya ke atas sektor primer.

Para sosiolog berpendapat, perubahan sosial dapat ditimbulkan oleh banyak faktor. Perubahan sosial dapat terjadi karena akibat perubahan teknik (Susanto, 1979:184). Bahkan perubahan sosial yang tertua, yang dikenal abad 13 dan 14 adalah akibat dari perubahan dalam bidang teknik.

Veblen (Selo Soemardjan, 1981:303) menyatakan, penemuan-penemuan baru dan inovasi teknologi akan menimbulkan perubahan masyarakat dalam berpikir dan bertindak, terutama jika diterapkan dalam skala luas. Berpikir dan bertindak adalah dua hal yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Apabila dalam berpikir dan bertindak

telah terjadi perubahan, akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan pada segenap aspek kehidupan lainnya.

Perubahan-perubahan semacam itu juga akan terjadi pada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang menyangkut suatu sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok dalam suatu masyarakat (Selo Soemardjan, 1981:303). Dengan demikian, perubahan sosial dapat direncanakan dan diperhitungkan dengan seksama (Bahren T. Sugihen, 1985).

Bagi bangsa Indonesia, upaya merealisasikan kebijakan pembangunan industrialisasi ini, berhadapan dengan sejumlah permasalahan yang tidak kalah rumitnya. Masalah kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran, pemukiman kumuh, urbanisasi, lingkungan hidup, dan berbagai masalah serta kesenjangan sosial lainnya. Masalah di atas perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan. Kalau tidak, maka ia akan menjelma sebagai penghambat bagi proses industrialisasi.

Alfian (1986:153) mengatakan, proses pembangunan itu tidak hanya menghasilkan hal-hal yang mendekatkan manusia dan masyarakat menuju kepada apa yang menjadi tujuan pembangunannya (*intended goals*), tetapi biasanya juga dibarengi oleh hal-hal yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan (*unintended results*). Betapapun, kegiatan

pembangunan diharapkan membawa dampak positif, namun tidak sedikit yang berdampak negatif.

Adanya dampak positif maupun negatif dari suatu proses pembangunan merupakan konsekwensi logis dari pelaksanaan suatu kebijakan. Walaupun suatu aktivitas pembangunan dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi dan kesenjangan, namun upaya tersebut sering pula membawa dampak yang tidak diinginkan -- menimbulkan permasalahan baru, sebagai efek sampingannya. Efek sampingan ini biasanya relatif kecil, dibandingkan dengan keuntungan yang didatangkannya, sehingga sering kurang atau tidak mendapatkan perhatian. Akibatnya muncul istilah korban pembangunan.

Adanya dampak positif dan negatif dari kegiatan pembangunan telah dirasakan masyarakat di Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) Dati II Aceh Utara sejak tahun 1970-an, sejalan dengan ditemukan sumber gas alam di Padang Arun oleh Mobil Oil Indonesia (PT. MOI). Temuan itu, pada tahun 1972 ditindaklanjuti dengan pembebasan tanah rakyat untuk lokasi pembangunan proyek. Tahun 1975 memulai pembangunan pabrik pengolahan/pencairan gas alam (PTA), dan memulai produksi tahun 1978. Kandungan gas alam dalam jumlah besar, mendukung berbagai proyek industri lain, terutama yang menggunakan bahan baku gas. Pada tahun 1981 dibangun Industri Pupuk Asean (PT. AAF). Tahun 1982, dibangun proyek Industri Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM). Tahun 1986

dibangun proyek Industri Kertas Kraft Aceh (PT. KKA), dan pada tahun 1987 dilanjutkan dengan Industri Elpiji.

Sejalan dengan pembangunan proyek-proyek industri besar di atas, bermunculan pula sejumlah proyek industri hilir lainnya, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta. Bahkan, berdasarkan survei Institutional Development Assistance Project (IDAP) dari Negeri Belanda dan Penda Tingkat I Aceh, serta Tim Riset Indoconsult-Redecon tersimpul, bahwa di ZILS bisa berkembang sekitar 112 jenis industri dasar, menengah dan kecil (Prisma No.7, 1987:85).

Pembangunan proyek-proyek industri besar di ZILS mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pesat di wilayah itu. Menurut Abdullah Ali (1985), kehadiran proyek-proyek industri besar di daerah Aceh diibaratkan munculnya sebuah pulau mewah di tengah-tengah samudera kemiskinan.

Memperhatikan kondisi fisik-lingkungan dan manusia penghuninya, sinyalemen Abdullah Ali di atas memang ada benarnya. Kehidupan penduduk dari suatu daerah terpencil dan suram, tertinggal dan statis, berubah menjadi suatu daerah penuh ceria, rakus bahkan berang serta penuh kedinamisan. Kawasan yang puluhan tahun silam diam, diselimuti semak belukar dan rawa-rawa, dipandang angker atau tempat jin buang anak. Kini, dalam beberapa tahun saja seakan-akan telah disulap menjadi suatu kawasan industri modern,

ramai dan mewah, serta menguak sejuta harapan, sehingga menarik perhatian banyak orang (Bahren T. Sugihen, 1985).

Kawasan ZILS saat ini merupakan pencerminan wajah ganda dari suatu pemukiman. Di lingkungan masyarakat sekitar bermukim penduduk setempat dengan latar belakang kehidupan pertanian dan nelayan (petambak ikan) dengan sistim garapan serba tradisional. Di sisi lain pemukiman karyawan industri yang mencerminkan gaya hidup mewah dan modern. Wajah ganda juga terlihat dalam pola pikir dan bekerja serba tradisional, berbenturan dengan pola pikir dan pola kerja modern.

Dampak positif dari proses industrialisasi di ZILS di antaranya ialah meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pendapatan regional, peningkatan devisa dan ekspor, memperbaiki kondisi fisik daerah, terbukanya jalur transportasi dan komunikasi dengan dunia luar, terciptanya lapangan kerja baru, memperbaiki struktur ekonomi masyarakat sekitar, bahkan terangkatnya status Aceh Utara dalam peta industri dunia (M. Natzir, 1985:7).

Dampak negatif dari proses industrialisasi terutama pada tahap-tahap awal pelaksanaan proyek. Sejak perintisan dan konstruksi bahkan sampai kini, berbagai nada sumbang atas kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di ZILS masih terdengar. Meliputi; kesenjangan penyerapan tenaga kerja, pembebasan tanah, sanitasi lingkungan, polusi udara,

fluktuasi harga dan biaya hidup sehari-hari, pergeseran adat-istiadat, lunturnya norma-norma sosial, pola konsumsi, komunikasi, interaksi, enclave pemukiman, arus urbanisasi, dualisme teknologi, kerawanan sosial dan keamanan, dan sebagainya (M. Natzir, 1985; Rusmin Tumanggor, 1987).

Tim Pengendalian Pembangunan Wilayah Industri (TP2WI) dalam laporannya (1982) menyebutkan, bahwa kehadiran industri berskala besar dengan teknologi padat modal di tengah-tengah perekonomian yang didukung oleh pertanian dengan teknologi padat karya serta masyarakat yang mempunyai kaedah bersahaja di Aceh Utara, telah dan akan menimbulkan perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut merupakan akibat dari terganggunya keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial, dan keseimbangan lingkungan.

Ibrahim Hasan (Prisma, 1987) mengakui bahwa masuknya industri berskala besar tersebut cukup mengejutkan bagi Aceh. Bertahun-tahun sebelum diketemukannya minyak bumi dan ladang gas alam di Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh lebih dipersiapkan menjadi daerah pertanian. Bahkan, tidak tanggung-tanggung diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Pembukaan Fakultas Pertanian di Universitas Syiah Kuala tahun 1966, pada dasarnya adalah untuk mendukung kebijakan di atas. Kini, yang berkembang adalah industri, sehingga yang diperlukan adalah tenaga-tenaga ahli dalam bidang elektro dan mesin. Akibatnya, terjadilah

keresahan di kalangan masyarakat (Prisma Nomor 7, 1987).

Menurut Dayan Dawood (1987), perubahan, keresahan dan keterkejutan paling kuat terjadi dan dirasakan penduduk di wilayah itu karena di sana hidup masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan rendah. Mereka adalah masyarakat terbelakang, dengan mata pencaharian pertanian, perikanan, atau pun sebagai nelayan tradisional. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba muncul industri padat modal dan teknologi canggih. Oleh karena itu, tidak mustahil jika kondisi masyarakat pun belum mampu beranjak dari praktek-praktek bekerja serba tradisional. Praktek bekerja seperti itu bermuara kepada perolehan penghasilan yang rendah pula, terutama jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang bekerja di industri. Kesenjangan pendapatan bermuara kepada terjadinya kecemburuan sosial, yang kadangkala dibarengi dengan tindakan pengusiran terhadap para tenaga kerja pendatang. Mereka merasa tidak puas karena sedikitnya tenaga kerja lokal yang terserap oleh industri dan sebaliknya tenaga kerja pendatang lebih mudah memperoleh pekerjaan di lingkungan perusahaan industri. Ketidakpuasan mereka tercermin dalam kata-kata: "*buya krueng teudong-dong, buya tamong neuraseuki*" atau "*kulat pak di Meulaboh kulat goh di Keumala, ureung toe han neuteumeung pajoh ureung jioh neuteuneung rasa*" (penduduk setempat terpaku ditempat sebagai penonton, yang mengambil keuntungannya



adalah para pendatang).

Sikap yang diperlihatkan oleh sekelompok orang di atas erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang formasi tenaga kerja yang diperlukan. Di samping transparansi pihak perusahaan industri mengenai formasi tenaga kerja yang diperlukan juga kurang, sehingga mengundang penafsiran yang bermacam-macam. Padahal menurut M. Natzir (1987), jika sebuah industri akan dibangun sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, dan dengan keterampilan/keahlian seperti apa. Dengan demikian, jenis dan tingkat tenaga kerja yang diperlukan dapat dipersiapkan, sehingga keresahan-keresahan yang mungkin timbul dan tidak diharapkan dapat dibatasi.

Menurut Sritua Arief (1978:128), proses industrialisasi pedesaan dengan bentuk sistim produksi yang tidak pro buruh (padat modal) dan dalam situasi adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian, ditambah dengan kelemahan-kelemahan struktural lainnya dalam suatu sistem sosial, tidaklah merupakan suatu proses transformasi yang menuju kepada kemajuan daerah pedesaan.

Menurut Robinson (Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981:129), membasmi kemiskinan melalui proses industrialisasi dengan mencontoh pola-pola yang diterapkan di negara-negara barat (negara maju) bagi negara-negara berkembang

adalah tidak tepat. Sebab, negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga membutuhkan akumulasi surplus yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka sendiri.

Untuk menanggulangi dampak negatif dari proses industrialisasi, pihak perusahaan industri besar di ZILS terpanggil untuk berperanserta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di kawasan itu, sejalan dengan proses industrialisasi tersebut. Pihak perusahaan berupaya mengembangkan masyarakat desa sekitar, melalui program "community development atau CD". Salah satu wujud dari program CD dimaksud adalah pembentukan dan pengembangan masyarakat desa binaan. Di lingkungan perusahaan industri, istilah desa binaan diperkenalkan dengan sebutan "Desa Model". Karena istilah desa binaan telah digunakan oleh pihak Penda, sehingga untuk membedakan antara keduanya maka dinamakan desa model.

Desa-desa model itu sendiri adalah desa-desa tradisional. Setelah desa-desa tersebut terpilih sebagai desa model/binaan, ia mendapatkan pembinaan dari perusahaan industri. Desa-desa itu pun masih menerima fasilitas pembangunan desa dari pemerintah seperti yang diterima desa-desa lainnya. Dengan demikian, desa model dapat disebut sebagai desa tradisional plus. Dalam kurun waktu 5 - 10 tahun, desa-desa model tersebut diproyeksikan menjadi desa percontohan, baik untuk pengembangan masyarakat di sekitar

desa model maupun untuk pengembangan masyarakat di kawasan industri nasional lainnya.

Desa-desanya model dimaksud adalah Desa Ujong Pacu, binaan PT. Arun (PTA) di Kecamatan Muara Dua. Desa Paloh Gadeng, Desa Tambon Tunong, dan Desa Tambon Baroh oleh PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), Desa Paloh Lada, Desa Keude Krueng Geukuh, Desa Uteuen Geulinggang, dan Desa Bangka Jaya oleh PT. Pupuk Asean (AAF), di Kecamatan Dewantara. Desa Jamuan oleh PT. Kertas Kraff Aceh (KKA), dalam wilayah Kecamatan Blang Mangat, serta Desa Nibong oleh Mobil Oil Indonesia (MOI) di Kecamatan Lhoksukon.

Adapun tujuan dari program CD perusahaan industri besar, khususnya pengembangan masyarakat desa model adalah: (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat lingkungan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan menyalurkan manfaat industrialisasi ke dalam segenap lapisan masyarakat lingkungan; (2) meningkatkan citra perusahaan berskala besar sebagai agen pembangunan sehingga "sense of belonging" masyarakat terhadap perusahaan akan lebih meningkat; dan (3) meningkatkan partisipasi dan koordinasi antara perusahaan dengan Penda bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat lingkungan (M. Natzir, 1985:22).

Untuk pencapaian tujuan di atas, maka sasaran program CD mengarah kepada bidang:

- 1) **Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Desa:** meningkatkan dan mengefektifkan unsur kepemimpinan dan lembaga-lembaga desa, serta memanfaatkan institusi nonformal serta perangkat adat desa bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara tertib dan harmonis;
- 2) **Pendidikan:** mengupayakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, pemuda, orang dewasa dan putus sekolah, baik formal maupun latihan-latihan keterampilan produktif yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara (P4), serta pembinaan bakat dan prestasi;
- 3) **Ekonomi/Mata Pencaharian:** mengupayakan peningkatan pendapatan penduduk di desa-desa sekitar;
- 4) **Kesehatan, Gizi dan Pemukiman:** meningkatkan kesehatan masyarakat terutama penanggulangan penyakit menular, perbaikan gizi masyarakat, serta penataan pemukiman yang bersih, indah dan teratur serta bernilai budaya sendiri; dan
- 5) **Fisik:** meningkatkan prasarana jalan dan jembatan desa, jalan lingkungan serta pengadaan listrik desa.

Memperhatikan pengertian, tujuan dan sasaran program CD perusahaan industri besar, maka secara ideal desa-desa model kelak diharapkan dan diwarnai oleh: (1) kondisi fisik, seperti sarana jalan, sarana peribadatan dan sarana pelayanan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan hidup,

permukiman dan perumahan sudah semakin baik dan tertata rapi; (2) kondisi non fisik seperti terbinanya unsur kepemimpinan desa yang cukup berkualitas, sarana dan kelembagaan desa yang ada sudah dimanfaatkan secara efektif bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan; tingkat pendidikan, keterampilan, kesejahteraan dan pendapatan penduduk semakin baik dan merata, kesadaran serta tanggung jawab berbangsa dan bernegara di kalangan penduduk desa yang semakin meningkat; kesadaran akan tingkat kesehatan, gizi, lingkungan hidup dan penataan perumahan bernilai budaya setempat semakin membudaya. Namun, seberapa jauh harapan dari pengembangan desa model tersebut dapat diwujudkan, sekaitan dengan aktualisasi prinsip pembangunan partisipatoris, masih memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam.

#### ***B. Masalah dan Fokus Penelitian***

Penelitian ini difokuskan kepada upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat desa model yang dilakukan oleh perusahaan industri besar Lhokseumawe (PTA, AAF dan PIM). Untuk menganalisis proses pengaktualisasian prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat desa model di ZILS.

Analisis pengaktualisasian prinsip pembangunan partisipatoris didasarkan pada prinsip-prinsip CD yang diajukan United Nations (1971), yang disederhanakan oleh

Sudjana (1991:208-211) dan Suryadi (1989), menjadi prinsip keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi.

Prinsip keterpaduan mengandung arti, bahwa program atau kegiatan CD disusun oleh, bersama, dalam, dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Perencanaan program dapat ditempuh dengan menggabungkan perencanaan dari masyarakat (bottom-up planning) dengan perencanaan dari pemerintah atau lembaga (top-down planning). Dengan demikian, program CD merupakan perpaduan berbagai kepentingan dan berintegrasi dengan program pembangunan nasional dan regional.

Prinsip berkelanjutan dimaksudkan, bahwa pengembangan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus melainkan diselenggarakan secara bertahap dan terus-menerus, menuju ke arah yang lebih baik. Program yang telah berhasil dilaksanakan harus dijadikan sebagai titik awal untuk pelaksanaan program berikutnya. Program atau kegiatan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan menuntut adanya kegiatan lanjutan.

Prinsip keserasian mengandung makna, bahwa program pengembangan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan yang dirasakan dan dinyatakan oleh perorangan, masyarakat, lembaga-lembaga, dan pemerintah. Keserasian

tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian juga tercermin antara kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Prinsip kemampuan sendiri dimaksudkan, bahwa program pengembangan masyarakat disusun dan dilaksanakan dengan didasarkan pada potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sasaran. Keikutsertaan pihak luar, baik perorangan, lembaga maupun pemerintah adalah untuk memberi dorongan dan bantuan sehingga masyarakat dapat mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki secara efektif dan efisien, dalam menjawab kebutuhan.

Prinsip kaderisasi bermakna, bahwa pengelolaan dan kelanjutan program pengembangan masyarakat hanya akan terlaksana dengan baik apabila di masyarakat terdapat atau telah disiapkan kader-kader yang mempunyai sikap, pengetahuan, keterampilan dan aspirasi membangun untuk memenuhi kepentingan bersama dan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Kader-kader tersebut kelak menjadi perantara dan penggerak masyarakat untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Prinsip pembangunan partisipatoris ini menjiwai prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran partisipatoris, yang

menjadi landasan pengembangan pendidikan luar sekolah. Kegiatan pembelajaran partisipatoris diselenggarakan dengan: (1) berdasarkan kebutuhan belajar dan berorientasi pada tujuan kegiatan belajar; (2) berpusat pada peserta didik; (3) bertolak dari pengalaman belajar; (4) mengacu kepada antisipasi masa depan (Sudjana, 1993).

Aktualisasi prinsip pembangunan partisipatoris dalam penelitian ini mengandung pengertian, penerapan prinsip keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi oleh perusahaan industri besar di ZILS, dalam aktivitas pembinaan dan pengembangan masyarakat desa model.

Penggalangan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan program CD ditelusuri pada kegiatan pengorganisasian warga masyarakat bagi pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan desa dan upaya pembinaan yang ditempuh dalam menggerakkan roda organisasi masyarakat, terutama dalam melaksanakan kegiatan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi, sekaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat desa model.

Upaya penggalangan keterlibatan masyarakat akan ditelusuri sejak tahap mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, menilai kegiatan, serta upaya-upaya yang ditempuh bagi pengembangan program berikutnya. Keterlibatan masyarakat



dalam upaya pengembangan masyarakat desa model, difokuskan pada keterlibatan kader (tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda terlatih) dalam menggalang keterlibatan anggota masyarakat lainnya bagi pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Berdasarkan pemikiran dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus dan masalah penelitian berikut ini: *"Apakah dan sejauhmanakah prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris teraktualisasi dalam upaya pengembangan masyarakat desa model yang ditempuh oleh PT. Arun, PT. Pupuk Asean dan PT. Pupuk Iskandar Muda di Zona Industri Lhokseunawe (ZILS) Daerah Tingkat II Aceh Utara?"*

Pengembangan masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan industri besar dalam membina masyarakat sekitar khususnya di desa-desa model. Dimulai dengan upaya menyadarkan masyarakat tentang permasalahan atau kebutuhan yang dirasakan dan diharapkan, mengidentifikasi permasalahan/kebutuhan bersama masyarakat, mengorganisasikan masyarakat, merencanakan kegiatan pemecahan masalah/kebutuhan bersama masyarakat, melaksanakan kegiatan pemecahan masalah secara bersama-sama, menilai pelaksanaan kegiatan, dan mengembangkan kegiatan selanjutnya.

Desa model sebuah nama yang diberikan perusahaan industri besar di ZILS terhadap desa binaannya. Jadi, desa

model sebetulnya adalah desa-desa tradisional yang dipilih dan dijadikan desa binaan oleh perusahaan industri besar. Pemberian nama "Desa Model" adalah untuk membedakannya dengan "Desa Binaan" yang ditempuh oleh Pemda. Desa-desa model ini di samping mendapat suntikan pembinaan dari perusahaan industri besar, juga masih mendapatkan seluruh fasilitas pembangunan desa dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, desa-desa model ini dapat dikatakan sebagai "desa tradisional plus".

Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) adalah suatu wilayah dalam Daerah Tingkat II Aceh Utara. Di wilayah ini kini tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan dan perkembangan pembangunan berbagai proyek industri besar. Wilayah itu tercakup dalam lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Banda Sakti sebagai ibu kota Kabupaten. Dewasa ini di ZILS terdapat konglomerasi industri dasar, yaitu: PT. Arun (pencairan gas alam), PT. Pupuk Asean, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Kertas Kraff Aceh, dan Industri LPG, serta industri kaitan dan pendukung lainnya.

Berdasarkan survey Institutional Development Assistance Project (IDAP) dari Negeri Belanda dan Pemda Tk. I Daerah Istimewa Aceh di ZILS dapat berkembang sampai dengan 112 jenis industri dasar dan kaitan. Apabila semua

jenis industri tersebut berkembang di ZILS, maka ZILS di masa depan diperkirakan akan menjadi sebuah zona industri yang terbesar di Asia Tenggara (M. Natzir, 1985; Prisma No.7, 1987).

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian di atas, untuk mengarahkan pengumpulan data, maka permasalahan penelitian dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum desa-desa model di Zona Industri Lhokseumawe?

Gambaran umum di sini mencakup potensi, permasalahan dan harapan masing-masing desa model. Potensi di sini berkenaan dengan geografi desa, mobilitas penduduk, fasilitas pelayanan masyarakat, sarana dan prasana yang mendukung, dan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Permasalahan menyangkut kesenjangan yang terjadi dan dialami masyarakat, baik menyangkut ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya dan keamanan, sehingga menjadi faktor kendala bagi warga masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Harapan yang dimaksud di sini adalah keinginan dan motivasi dari masyarakat desa model untuk berupaya meningkatkan taraf hidupnya.

2. Pertimbangan apa saja yang melandasi dan diharapkan oleh perusahaan-perusahaan industri besar Lhokseumawe

dalam mengembangkan dan membina masyarakat desa model?

Pertimbangan yang dimaksudkan di sini adalah alasan-alasan yang dijadikan pegangan oleh perusahaan industri besar sehingga melakukan upaya pengembangan masyarakat desa model. Alasan dimaksud berkenaan dengan misi perusahaan, peraturan yang dijadikan acuan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan program pengembangan masyarakat desa model.

3. Strategi kegiatan apa saja yang ditempuh perusahaan industri besar Lhokseumawe dalam mengembangkan masyarakat di desa-desa model? Mengapa strategi kegiatan seperti itu yang ditempuh? Bagaimanakah strategi itu dilaksanakan?

Strategi yang dimaksudkan di sini adalah sistem atau siasat kerja yang dianut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat model. Strategi dimaksud dapat mengacu kepada penerapan strategi fasilitatif, strategi reedukatif, strategi persuasif, strategi kekuasaan, atau strategi ganda/gabungan.

Untuk menelusuri strategi yang dipraktekkan oleh perusahaan industri besar Lhokseumawe dalam mengembangkan masyarakat desa model, akan dikaji pada bentuk dan jenis kegiatan, langkah-langkah yang ditempuh dan pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan dan membina kegiatan.

Langkah-langkah yang dimaksudkan di sini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilalui dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat desa model. Dalam merencanakan kegiatan pengembangan tertentu, tahapan-tahapan kegiatan apa saja yang ditempuh pihak perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penggalangan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses perencanaan itu? Demikian pula halnya dalam pelaksanaan kegiatan, pengevaluasian kegiatan dan pengembangan kegiatan/program berikutnya?

Pendekatan yang dimaksudkan di sini adalah cara (metode) yang dipakai dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pembinaan. Misalnya, salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam proses perencanaan program/kegiatan adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan. Bagaimana proses pengidentifikasian permasalahan atau kebutuhan itu dilakukan? Apakah dengan mendatangi setiap individu yang menjadi sasaran, melalui tokoh-tokoh masyarakat atau keucik (Kepala Desa), melalui rapat umum desa, melalui pertimbangan ahli, melalui intruksi Pemda/Bappeda, atau bagaimana?

4. Dampak apa saja yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan program CD, baik untuk masyarakat di desa-desa model maupun untuk desa-desa dan masyarakat sekitar, di luar desa model?

Dampak yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang dicapai serta imbasan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat desa model. Apakah bentuk pengembangan masyarakat model berpengaruh terhadap peningkatan keterlibatan anggota masyarakat di dalam kelompok, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penilaian kegiatan dan pengembangan kegiatan?

Apakah upaya pengembangan desa model berpengaruh terhadap perubahan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok? Dalam aspek apa saja perubahan itu terjadi, perubahan dalam pola bekerja/berusaha, peningkatan keterampilan, peningkatan pendapatan, kesehatan, tumbuh dan berkembangnya masyarakat gemar belajar, munculnya manusia-manusia berperilaku wirausaha (entrepreneurship), peningkatan partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat desa, maupun kemajuan pembangunan fisik desa model lainnya? Apakah pengembangan masyarakat desa model berimbas terhadap pengembangan masyarakat sekitarnya?

5. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat desa model, sekaitan dengan upaya pengaktualisasian prinsip-prinsip pengembangan masyarakat partisipatoris?

Hambatan adalah kendala yang dihadapi, sehingga

tujuan dan sasaran pengembangan desa model belum berhasil sebagaimana diharapkan. Hambatan-hambatan dimaksud dianalisis berkenaan dengan kewenangan, kebijaksanaan, atau manajemen perusahaan, kebijaksanaan pemerintah, kondisi masyarakat, dan aspek sosio-kultural lainnya.

### *C. Tujuan Penelitian*

Penelitian ini berbentuk analisis-deskriptif, sehingga hasil yang diperoleh adalah proposisi-proposisi yang mengarah kepada "hypothesis generating". Dengan demikian, tujuan akhir penelitian adalah menyempurnakan konsep pengembangan masyarakat desa, khususnya pengembangan masyarakat desa di ZILS. Mengingat masyarakat di ZILS dan masyarakat Aceh umumnya mempunyai karakteristik yang melekat dengan ajaran agama (Islam), maka konsep pengembangan yang dihasilkan adalah konsep-konsep pengembangan masyarakat desa partisipatoris bermuatan PLS, yang diperhitungkan dapat digeneralisasikan dan bersifat kontekstual dengan situasi dan kondisi masyarakat Aceh atau situasi dan masyarakat lainnya yang memiliki karakteristik yang sama atau hampir bersamaan. Dengan demikian, produk dari disertasi ini adalah konsep pengembangan masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris bermuatan PLS yang disempurnakan.

Untuk merumuskan proposisi-proposisi berbentuk hypothesis generating dimaksud, maka secara operasional penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan, mencari, menemukan, menyingkap, mendeskripsikan dan menganalisis informasi-informasi yang berkenaan dengan:

1. Gambaran umum daerah penelitian khususnya desa-desa model yang dikenakan penelitian.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang melandasi dan diharapkan dalam upaya pengembangan masyarakat desa model di ZILS yang dilakukan oleh perusahaan industri besar Lhokseumawe Aceh Utara.
3. Strategi yang ditempuh dalam upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat di desa-desa model, dalam hubungannya dengan pengaktualisasian prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris.
4. Dampak yang ditimbulkan dari upaya pengembangan masyarakat desa model, baik untuk desa dan masyarakat di desa model sendiri maupun bagi desa-desa dan masyarakat sekitar di luar desa model.
5. Hambatan yang dihadapi sehingga tujuan dan sasaran pengembangan masyarakat desa model di ZILS, sekaitan dengan pengaktualisasian prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris belum tercapai.



#### ***D. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemikiran mengenai upaya-upaya pengembangan masyarakat desa berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris, bermuatan PLS. Terbukanya peluang pengembangan masyarakat desa melalui pembinaan desa model atau desa binaan untuk dijadikan sebagai acuan bagi upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat desa dalam konteks yang lebih luas.

Secara khusus adalah terbukanya peluang bagi peningkatan fungsi dan peranan PLS dalam pengembangan masyarakat desa, baik sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat maupun sebagai pendekatan dasar bagi pelaksanaan pengembangan masyarakat, berlandaskan prinsip pembangunan partisipatoris. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

Secara praktis, temuan-temuan penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan, seperti; para pembuat kebijakan, perencana, pengelola, pelaksana, penyelenggara, peserta didik, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya dengan upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat desa.

Secara rinci, dalam bentuk praktis temuan peneli-

tian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya:

1. Penyusunan kebijakan, penentuan langkah, dan strategi yang dapat ditempuh dalam membina dan mengembangkan masyarakat desa. Dalam rangka mengejar berbagai keteringgalan yang dialami masyarakat desa khususnya di desa-desa model. Mulai pada tahap merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, membina, menilai dan mengembangkan kegiatan pembangunan desa secara kontekstual. Untuk menyongsong pembangunan era industrialisasi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penjalinan dan peningkatan kerjasama antar unsur dan instansi terkait, bagi pengembangan program pembangunan masyarakat desa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah pedesaan, dan pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan demikian, konsistensi, konvergensi dan kontinuitas serta relevansi penyelenggaraan kegiatan akan terpelihara, dan sekaligus menghindari pelaksanaan program-program pembangunan desa secara tumpang tindih, yang mengakibatkan terjadinya pemborosan, ketidak-efisienan dan ketidakefektivan.
3. Peningkatan peranan dan fungsi PLS sebagai bagian penting dan sebagai pendekatan dasar pembangunan masyarakat desa. Untuk meningkatkan, mengembangkan dan

memanfaatkan potensi-potensi yang ada (alam dan sumber daya manusia) di daerah pedesaan bagi pembangunan.

4. Pengaktualisasian prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris bermuatan PLS, dan kontekstual dengan sosio-kultural masyarakat, dalam berbagai kegiatan pembangunan. Untuk membina dan mengembangkan masyarakat desa, sehingga mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat desa, sekaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Menyongsong pembangunan era industrialisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan dunia yang semakin global.

